

**Jurnal Skripsi**  
**ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH**  
**(Studi Kasus di Daerah Perbatasan Kabupaten Cirebon)**  
**Tahun 2014-2016**  
**Oleh: Nida Khoirunnisa**  
**(20130520362)**  
**Email: khoirunnisanida@yahoo.com**

**Abstrak**

Masalah lingkungan telah menjadi perhatian internasional, bahkan kepopulerannya sejajar dengan HAM dan Demokrasi. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Persoalan sampah di Kabupaten Cirebon belum juga usai. Setelah sampah-sampah menumpuk di TPS wilayah Barat gara-gara TPA Gunung Santri ditutup, kini sampah di wilayah tengah yang menumpuk. Salah satunya TPS di Desa Pilang Sari, Kecamatan Kedawung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Cipta Karya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari lima aspek yakni aspek operasional, aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Tiap aspek terdapat kekurangan dan kelebihannya. Dilihat secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Pilang Sari belum semuanya terkelola dengan baik. Dengan alat yang minim, lokasi TPS yang terletak di pinggir jalan serta tidak adanya keterlibatan dalam masyarakat sehingga statusnya seperti sekarang ini yaitu darurat sampah di TPS Pilang Sari.

**Kata kunci :** Konsep Dinas dalam pengelolaan sampah, Problematika dalam pengelolaan sampah, Peran serta masyarakat.

## **1. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang Penelitian**

Warga Kabupaten Cirebon diminta jangan membuang sampah di beberapa tempat pembuangan sampah (TPS) yang berada di perbatasan Kota dan Kabupaten Cirebon. Permintaan ini disampaikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cirebon setelah pihak Kabupaten Cirebon mempertanyakan soal retribusi sampah yang diambil oleh DKP setelah kontrak kerja sama tidak diperpanjang sejak Maret 2015 lalu. Menurut Kepala DKP Kota Cirebon, Taufan Barata menyebutkan, sebenarnya wajar kalau pihaknya masih memungut retribusi kepada warga Kabupaten Cirebon, sebab warga Kabupaten Cirebon di wilayah perbatasan membuang sampah ke TPS yang merupakan milik Pemerintah Kota Cirebon (dikutip dari website yang beralamatkan: <http://www.kabar-cirebon.com/read/2015/11/pelayanan-sampah-warga-kabupatendipertanyakan/>).

Sampah-sampah menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Barat gara-gara TPA Gunung Santri ditutup, kini sampah di wilayah tengah yang menumpuk. Salah satunya TPS di Desa Pilang Sari, Kecamatan Kedawung. Tak hanya gara-gara TPA Gunung Santri ditutup yang membuat sampah banyak menumpuk di TPS Desa Pilang Sari ini, namun juga disebabkan oleh rusaknya truk untuk memuat sampah tersebut. Dua TPA di wilayah timur yaitu Ciledug dan Ciawijapura sudah kelebihan kapasitas karena TPA Gunung Santri yang sudah ditutup untuk kegiatan membuang sampah. Tadinya, TPA Ciledug tidak begitu aktif, namun akhirnya diaktifkan kembali saat TPA Gunung

Santri sepi aktivitas (dikutip dari website yang beralamatkan: <http://www.kabar-cirebon.com/read/2016/06/sampah-menumpuk-di-pilang-sari/>).

Persoalan sampah di Kabupaten Cirebon sepertinya tidak akan pernah tuntas. Selain kurang kesadaran dari warga, instansi terkait juga belum punya strategi jelas untuk memperbaikinya. Yang parah lagi, tumpukan sampah itu berada di Jalan Raya Pilang Kedawung, yang merupakan jalan nasional. Sebagian jalur nasional sudah tertutup akibat luberan sampah rumah tangga yang sudah menggunung di TPS Jalan Raya Pilang Kedawung. Meski demikian, warga tetap saja melakukan pembuangan sampah di TPS tersebut dikutip dari: <http://www.radarcirebon.com/lewat-jalan-pilang-wah-penuh-sampah.html>).

Berdasarkan penelusuran data akan permasalahan terkait pengelolaan sampah oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Kabupaten Cirebon maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi "**Analisis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016**".

#### **b. Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana konsep pengelolaan sampah di perbatasan Kabupaten Cirebon tepatnya di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dari Tahun 2014-2016 ?

#### **c. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran strategi yang digunakan oleh DCKTR Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung yang ada di perbatasan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menginventarisasi problematika yang dihadapi DCKTR Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung yang ada di perbatasan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk memberikan rekomendasi bagi DCKTR Kabupaten Cirebon dalam menyempurnakan pengelolaan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung yang ada di perbatasan Kabupaten Cirebon.

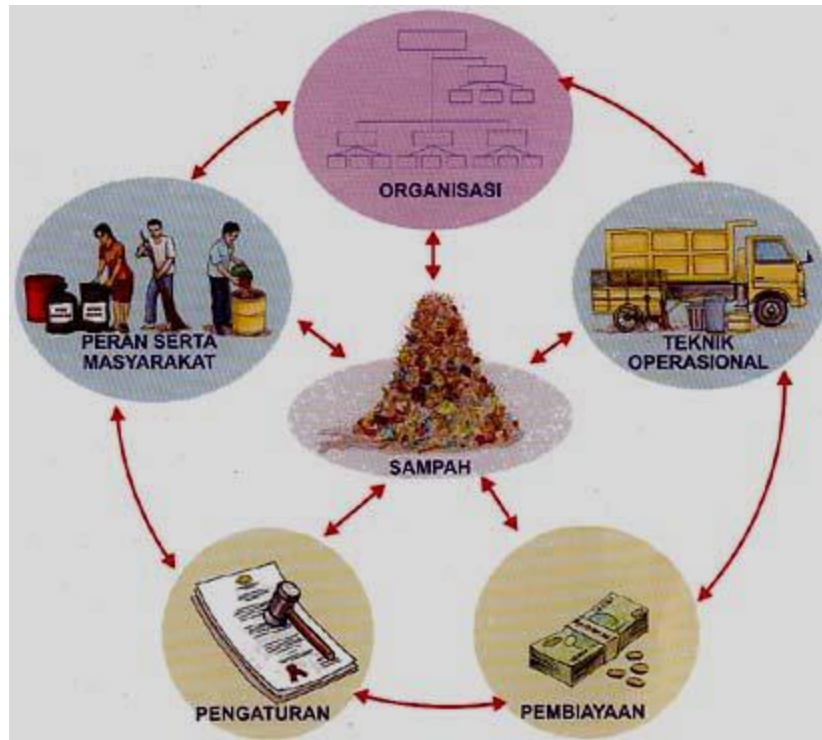
#### **d. Kegunaan Penelitian**

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan demi mendapatkan gelar sarjana strara S-1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Aspek-Aspek Pengelolaan Sampah Menurut Departemen Pekerjaan Umum**

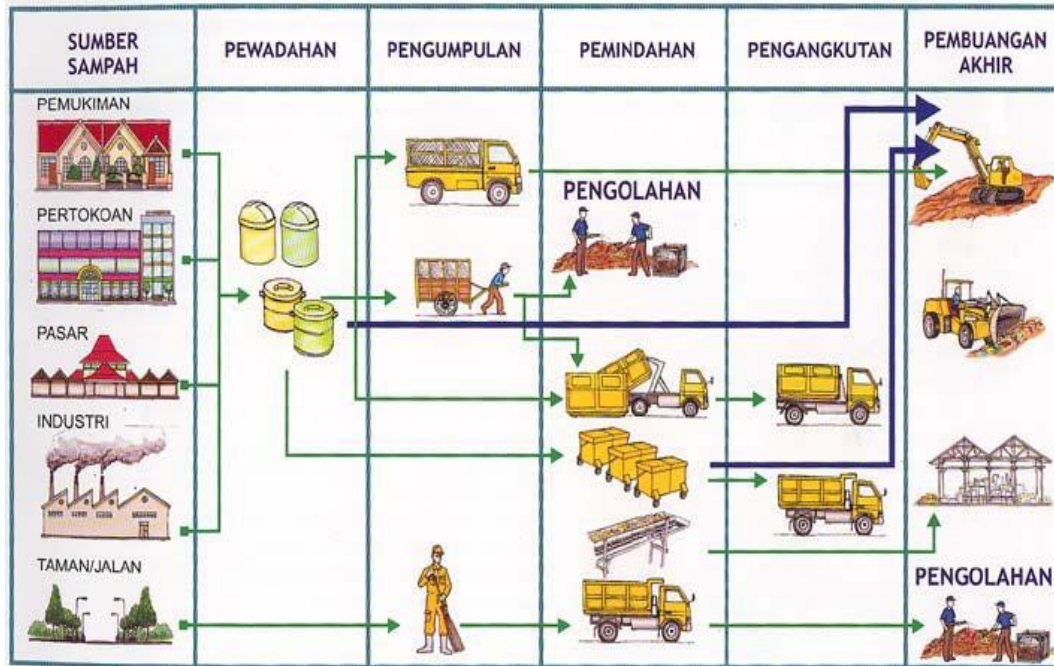
Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung di mana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat.



Gambar 1.2  
 Skema Manajemen Pengelolaan Sampah  
 (Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (SNI 19-2454-2002)

### 1. Aspek Teknik Operasional

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Menurut Hartoyo (1998: hal. 6), perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan.



Gambar 1.3  
 Teknis Operasional Pengelolaan Sampah  
 (Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI 19-2454-2002))

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan (Tchobanoglous, 1997: hal. 363).

**a. Penampungan sampah**

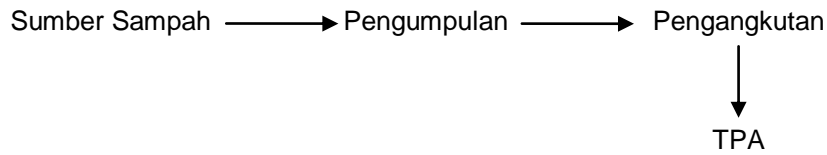
Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002).

**b. Pengumpulan sampah**

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut :

**1. Pola Individual**

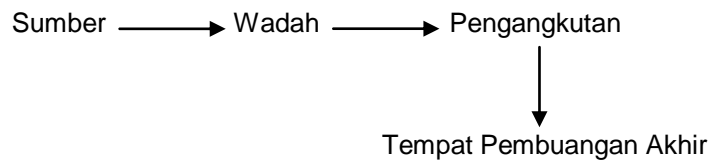
Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara / TPS sebelum dibuang ke TPA.



Gambar 1.4  
Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung  
Sumber: SNI 19-2454-2002

## 2. Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan / ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.



Gambar 1.5  
Pola Pengumpulan Sampah Komunal  
Sumber: SNI 19-2454-2002

### c. Pemindahan sampah

Pemindahan sampah merupakan proses memindahkan dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir. Pada umumnya pemindahan sampah di kota besar dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual atau kombinasi keduanya.

### d. Pengangkutan

Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengangkut. Di daerah pemukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: truk, *dump* truk, *compactor* truk, multi *loader*, *crane*, dan mobil penyapu jalan.

### e. Pembuangan akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah.

## 2. Aspek Kelembagaan

Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan

wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola (Widyatmoko dan Moerdjoko, 2002: hal. 29).

Jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1.000 penduduk.

### **3. Aspek Pembiayaan**

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi (Dit. Jend. Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003).

Menurut SNI – T-12-1991-03 tentang Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. biaya pengumpulan 20 % - 40 %.
- b. biaya pengangkutan 40 % - 60 %.
- c. biaya pembuangan akhir 10% - 30 %.

Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan Pemerintah Daerah (20%) yang digunakan untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. Sedangkan dana pengelolaan persampahan suatu kota besarnya disyaratkan minimal  $\pm 10$  % dari APBD. Besarnya retribusi sampah didasarkan pada biaya operasional pengelolaan sampah (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003). Di Indonesia, besar retribusi yang dapat ditarik dari masyarakat setiap rumah tangga besarnya  $\pm 0,5$  % dan maksimum 1 % dari penghasilan per rumah tangga per bulan (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003: hal. 67).

### **4. Aspek Peraturan/Hukum**

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi (Hartoyo, 1998: hal. 8) :

- a. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
- b. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
- c. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

### **5. Aspek Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran

prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan (LP3B Buleleng-Clean Up Bali, 2003: hal. 40). Dalam aspek peran serta masyarakat dapat dilihat dari :

- a. Rutinitas pembayaran retribusi sampah.
- b. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti.
- c. Penyediaan tempat sampah pribadi.

## **B. Pengertian Otonomi Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian didalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksudkan hak-hak bagi daerah otonom adalah daerah memiliki hak, antara lain :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **3. OBJEK dan METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, karena instansi ini mempunyai peran penting dalam terciptanya pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu yang ada di Kabupaten Cirebon. Sumber data atau sumber informasi dalam penelitian ini meliputi :

- a. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
- b. Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- c. Balai Desa Pilang Sari;
- d. Petugas Kebersihan di TPS Pilang Sari;
- e. Masyarakat di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data studi kasus dan monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit.

#### 4. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Di Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari lima (5) aspek yakni;

##### a. Aspek Operasional

Pada aspek operasional seksi kebersihan Kabupaten Cirebon telah melakukan penampungan/pewadahan sampah di tingkat sumber namuh masih banyak warga Pilang Sari yang belum memilah milih sampahnya di tingkat sumber (rumah tangga), pengumpulan sampah di rumah tangga, pemindahan sampah ke TPS telah dilakukan oleh petugas gerobak, pengangkutan sampah ke TPA menggunakan alat-alat yang dimiliki dinas dengan menggunakan *dumptruck*, dan pengolahan sampah yang belum dapat dikelola secara sistematis karena masih menggunakan cara tradisional yaitu pembakaran sampah menggunakan alat khusus di TPA.

##### b. Aspek Kelembagaan

Pada aspek kelembagaan DCKTR telah membuat struktur organisasi, fungsi organisasi dan tanggung jawab organisasi, dengan demikian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih terjadi *overlapping*/tumpang tindih tugas dengan instansi lain yang mempunyai tupoksi sama dan penempatan jabatannya juga masih belum tepat karena pegawai yang belum paham betul mengenai pengelolaan sampah ditempatkan sebagai ketua bidang atau ketua seksi.

##### c. Aspek Peraturan

Pada aspek peraturan DCKTR mempunyai beberapa perda yang menjadi patokan dalam pengelolaan sampah yakni perda tentang ketentuan umum pengelolaan kebersihan yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2012, perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2016, perda khusus menentukan struktur tarif dasar pengelolaan kebersihan yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2011. Namun peraturan tersebut belum ditegakkan secara tegas, karena masih banyak warga yang melanggar namun tidak ditindak lanjuti oleh Dinas.

##### d. Aspek Pembiayaan

Pada aspek pembiayaan Dinas telah menentukan uraian mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan untuk SDM pengelola sampah yaitu sebesar Rp. 1.400.000 untuk pasukan kuning, jumlah pembiayaan operasional pengelolaan sampah yang mana dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu khusus Pilang Sari sebesar Rp. 400.000/bulan.

##### e. Aspek Peran Serta Masyarakat

Dalam aspek yang terakhir ini dapat dilihat dari rutinitas pembayaran masyarakat dalam retribusi sampah masih belum sadar semuanya karena ada sebagian masyarakatnya yang enggan untuk membayar retribusi padahal mereka membuang sampah ke TPS tersebut, keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti sesekali masyarakat turun tangan membantu Dinas, dan dalam indikator penyediaan tempat sampah pribadi ada yang sadar sendiri ada yang masih meminta permohonan pada Dinas agar diberikan tong sampah kepada warga.



## 5. KESIMPULAN dan REKOMENDASI

### a. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas mengenai analisis pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon khususnya di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung dari tahun 2014-2016 diperoleh data dari hasil penelitian penulis baik di lapangan maupun melakukan wawancara dengan instansi Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai informan dalam mendapatkan data-data yang akan penulis teliti. Semua hasil pembahasan di bab analisis merupakan data murni yang diambil dari hasil penelitian.

Sesuai dengan metode dan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif di mana dengan merangkai kenyataan menjadi suatu cerita, yang menguraikan secara teratur suatu masalah keadaan atau dapat penulis simpulkan dalam skripsi ini terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon Khususnya di Pilang Sari Kecamatan Kedawung pada tahun 2014-2016.

Di Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari lima (5) aspek yakni; Aspek Operasional, Aspek Kelembagaan, Aspek Peraturan, Aspek Pembiayaan dan Aspek Peran Serta Masyarakat. Dari uraian aspek-aspek di atas terdapat kekurangan dan kelebihan, yakni;

aspek operasional penilaiannya adalah di mana dinas telah melakukan apa yang menjadi tolak ukur di dalam aspek tersebut, namun sayangnya karena keterbatasan kapasitas armada yang dimiliki dan belum adanya pengelolaan secara sistematis mengakibatkan sampah belum sepenuhnya teratasi dengan baik. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sedang berusaha memikirkan konsep yang tepat dalam penanganannya.

Pada aspek kelembagaan penilaiannya adalah Dinas sudah membuat semua yang menjadi tolak ukur dalam hal kelembagaan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun kekurangannya adalah dalam penempatan jabatan struktur organisasi masih belum tepat sasaran karena masih banyak diantara pegawai yang belum memahami betul mengenai persampahan ditempatkan sebagai ketua bidang atau ketua seksi dan terjadi tumpang tindih tupoksi dengan instansi lain yang mempunyai kesamaan tupoksi karena tidak adanya ketegasan di tingkat sektoral untuk menjembatani sinergisitas kedua instansi tersebut sehingga dalam menyelesaikan permasalahan terkait sampah belum bisa teratasi dengan baik. Dalam aspek peraturan yang mana dinas telah membuat peraturan secara jelas dan terperinci tentang pengelolaan sampah namun dalam pelaksanaannya sering kali peraturan itu tidak ditegakkan secara tegas sehingga bagi pelanggar tidak ada sanksi yang dikenakan.

Aspek pembiayaan pada aspek ini dapat dilihat bahwa Dinas telah merinci biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah dan biaya untuk pembayaran SDM pengelola sampah, minimnya biaya yang dimiliki dinas karena sebagian masyarakat tidak mau dikenakan retribusi sehingga perawatan alat pengangkut sampah menjadi terhambat. Padahal sebagian dari mereka membuang sampah di TPS tersebut.

aspek peran serta masyarakat penilaiannya adalah di mana masyarakat tidak berperan secara aktif karena *mindset* masyarakat menyatakan bahwa masalah sampah merupakan tanggung jawab pemerintah semata, dalam hal kerja bakti sesekali masyarakat turun tangan. Padahal sejatinya masalah sampah merupakan masalah bersama. Butuh kerjasama seluruhnya agar bisa teratasi dengan cepat dan tepat.

## **b. Rekomendasi**

### **1. Untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon**

- a. Agar lebih efektif dalam pengelolaan sampahnya, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan kembali termasuk alat angkut untuk mengambil sampah perlu diperbaharui karena usianya sudah terlalu tua.
- b. Instansi harus memperbaharui website dan data-data yang berkaitan dengan masalah lingkungan khususnya mengenai persampahan sehingga dapat dilihat masyarakat secara terbuka serta adanya transparansi dalam anggaran yang digunakan dalam penanganan sampah.
- c. Perlu pembangunan TPA di wilayah Barat, Tengah dan Utara agar meminimalisir tumpukan sampah.
- d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon harus tegas dalam penegakkan hukum yang ada terkhusus dalam persoalan sampah, agar mampu mengubah mindset masyarakat dan memberikan efek jera.
- e. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam hal penanganan sampah dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjembatani koordinasi diantara keduanya.

### **2. Untuk Masyarakat Pilang Sari Kabupaten Cirebon**

- a. Agar Masyarakat Pilang Sari melakukan pemilahan sampah di tingkat sumber serta membayar retribusi tepat waktu dan rutin karena penanganan sampah membutuhkan biaya yang besar.

### **3. Untuk Pemerintah Pusat**

- a. Agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan peralatan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Amu, Roslina. 2014. *Kolaborasi Pengelolaan Sampah*. Sleman: CV. Independent Generation.
- Azwan, Asrul. 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN), 1991, *Standar Nasional Indonesia (SNI) S – 04 – 1991 – 03 tentang Spesifikasi Timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, cetakan pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Departemen Kesehatan. 1987. *Pedoman Bidang Studi Pembuangan Sampah*. Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat.
- Gelbert, M., et. al. 1996, Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart", Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang.
- Hadi, Sudharto P. 2005. *Demensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartoyo. 1998. *Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Timur*, Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota, Fakultas Teknik. Brawijaya, Malang.
- Hermawati dan Ikbal, 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Yogyakarta: Plantaxia.
- Kartikawan, Yudhi. 2007. *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta: J. Lingkungan Hidup.
- Kusumaningrum, Alvita. 2005, *Evaluasi Pengangkutan Sampah di Kabupaten Sleman*, tugas akhir mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- LP3B Buleleng-Clean Up Bali, 2003, *Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis pada Masyarakat*, USAID, Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2003, Revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 03 – 3242 -1994 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2007. *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poewadarminta. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Prabowo. 2003 *Sistem Pengelolaan Transportasi Sampah di Sektor Kota Blora dan Kecamatan Jepon Kabupaten Blora*, Tugas akhir Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riyadi, Slamet. 1986. *Pengantar Kesehatan Dimensi dan Tinjauan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- S. Alex. 2011. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Singarimbun, Asri dan Sofian Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES.
- Sudrajat, H. 2007. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Swadaya.
- Suprihatin, Prihanto, dan Gelbert. 1999. *Sampah dan Pengelolaannya*. Malang: PPGT/VEDC.

Syafiie, Kencana Inu. Sistem Pemerintahan Indonesia.

Syafrudin, CES, Ir. MT. 2004. *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.

Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliassen, R. 1997, *Integrated Solid Waste Manajemen*, Mc.Graw Hill : Kogakusha, Ltd.

Tuti Kustiah. 2005. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.

Widyatmoko, H dan Sintorini. 2002. *Menghindari, Mengelola dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abdi Tandır.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kementerian Lingkungan Hidup, 1997, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kementerian Lingkungan Hidup, 2008, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, 2006, *Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)*, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, (SNI 19-2454-2002).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati Cirebon No. 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

#### **Surat Kabar**

Hadi, Sudharto P., 2004, Sindrom Sampah, Kompas 7 Desember 2008, Jakarta.

#### **Website**

[http://www.kabar-cirebon.com/read/2015/11/pelayanan-sampah-warga kabupatendipertanyakan/](http://www.kabar-cirebon.com/read/2015/11/pelayanan-sampah-warga-kabupatendipertanyakan/) (diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 22.00 wib).

<http://www.kabar-cirebon.com/read/2016/06/sampah-menumpuk-di-pilang-sari/> (diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 22.30 wib).

<http://www.radarcirebon.com/lewat-jalan-pilang-wah-penuh-sampah.html> (diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 22.45 wib).

<http://news.fajarnews.com/read/2016/01/27/8511/volume.sampah.di.kab.cirebon.capai.1.000.meter.kubik.per.hari> (diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 23.00 wib).

<http://www.radarcirebon.com/persoalan-sampah-harus-ada-tps-di-tingkat-desa.html> (diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 23.30 wib).

<http://www.kabar-cirebon.com/read/2016/01/volume-sampah-di-kabupaten-cirebon-tinggi/> (diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 00.48 wib).

<http://dcktr.cirebonkab.go.id/tupoksi> (diakses pada tanggal 04 Oktober 2016 pukul 10.00 wib).

<http://dcktr.cirebonkab.go.id/visi-dan-misi> (diakses pada tanggal 04 Oktober 2016 pukul 10.30 wib).

<http://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenCirebon> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 20.30 wib).

<http://www.cirebonkab.go.id/sekilas-kab-cirebon/sejarah-kabupaten-cirebon> (diakses pada tanggal 10 November 2016 pukul 21.25 wib).